

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta: Andi
- Walijatun Djoko, 1999 *Pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan jabatan (PPAT) Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP nomor 37/1998-PERMEN NA/KA BPN nomor 4/1999)*, Jakarta: 1999
- Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, 2003. Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-Ht.03.01 Tahun 2003 Tentang Pedoman Peraturan Tentang Kenotaris di Indonesia, Jakarta: CV.Mitra Darmawan
- Aengatombom https://id.scribd.com/doc/149548027/Pengertian-Objek-penelitian_di_Upload_tanggal_23 Juni 2013 Jun 23, di akses pada tanggal
- <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/pdf> PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 261/PMK.03/2016 Tentang Tatacara Penyetoran ,pelaporan dan pengecualian pengenaan pajak penghasilan Hak Atas Tanah. dan/atau bangunan. Dan Perjanjian Pengikatan Jualbeli atas tanah dan atau bangunan Beserta perubahannya, di akses pada tanggal 04 Juli 2018
- https://ppid.bandung.go.id/?media_dl=12423_bphtb_2012.pdf PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR: 393 TAHUN 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah, di akses pada tanggal 04 Juli 2018